

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia memberi dampak yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Salah satu dampaknya adalah banyaknya bank yang mengalami kebangkrutan hingga akhirnya harus dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Keputusan untuk melikuidasi 16 bank pada bulan November tahun 1997 diperkirakan sebagai pemicu krisis kepercayaan masyarakat pada perbankan di Indonesia. Sebagai dampak dari krisis kepercayaan itu, terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat. Hal tersebut diyakini terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor dan masyarakat mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap praktek *corporate governance*.

*Asian Corporate Governance Association* (ACGA) melakukan sebuah survey tentang pelaksanaan *corporate governance* pada 11 negara di kawasan Asia yaitu Hong Kong, Singapura, Jepang, Thailand, Malaysia, Taiwan, India, Korea, Cina, dan Filipina, dan Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa Indonesia berada di peringkat terakhir dalam *market ranking and scores*. Secara berturut-turut dari tahun 2010, 2012 dan 2014 Indonesia selalu mendapat peringkat terendah dengan skor 40, 37 dan 39. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia masih lemah dan belum dapat

berjalan secara baik dan profesional. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan *corporate governance* di negara ini membutuhkan banyak sekali perbaikan.

*Corporate governance* muncul sebagai solusi dari adanya konflik kepentingan dari para manajer dengan pemilik saham. Tujuan utama pemilik saham berinvestasi di suatu perusahaan adalah untuk memperoleh *return* yang seimbang dari investasi yang telah dikeluarkan. Namun terkadang manajer sebagai pihak *agent* yang menjalankan perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dari para pemegang saham. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi para pemegang saham, tentang bagaimana mereka dapat melindungi hak dan kepentingannya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem pengawasan yang tepat agar tata kelola perusahaan yang baik dapat tercipta dan perusahaan memperoleh kepercayaan dari publik dan para pemegang saham.

Bank dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan (Taswan, 2010:7). Oleh karena itu, tata kelola perusahaan pada bank harus dilakukan secara profesional agar bank dapat senantiasa menjaga kestabilannya. *The Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) (2006) dalam Q, Liang *et al.*(2013) menjelaskan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan kepercayaan dan keyakinan publik di sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Pada Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 pasal 2 juga disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-

prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* pada bank sangat diperlukan karena bank memegang peran penting bagi masyarakat dan perekonomian di suatu negara.

Salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah keberadaan dari dewan komisaris. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas yang memiliki fungsi untuk memonitor kinerja para dewan direksi. Selain itu, dewan komisaris memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta mengawasi kualitas informasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keberadaan dewan komisaris pada bank menjadi sebuah mekanisme kunci untuk mengawasi perilaku manajer dan memberikan nasihat pada mereka tentang identifikasi strategi dan implementasinya (Andres dan Vallelado, 2008).

Saat ini, isu diversitas pada dewan komisaris telah berkembang dan mulai mendapat banyak perhatian. Penelitian mengenai karakteristik dan latar belakang anggota dewan semakin dianggap penting. Seperti yang dikutip dari Ingley dan Van der Valt (2003) dalam E. Garcia-Meca (2015), bahwa konsep diversitas pada komposisi dewan dan berbagai kombinasi dari karakteristik dan keahlian dewan, bergantung pada kemampuan dari anggota dewan secara individual dalam hubungannya dengan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja bank sepertinya memiliki hubungan yang cukup signifikan mengingat eratnya hubungan antara dewan komisaris sebagai pengawas dengan efisiensi kinerja bank. Karakteristik dewan

komisaris dapat dilihat dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan efektifitas fungsi dewan komisaris.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pemerintahan, Institusi dan Organisasi *National University of Singapore (NUS) Business School* menunjukkan bahwa dari 424 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, hanya 40% di antaranya yang memiliki anggota direksi atau komisaris perempuan. Di dalam penelitian itu juga dipaparkan bahwa dari 3.736 anggota dewan direksi dan komisaris, hanya 11,6% yang berjenis kelamin perempuan (Dieleman dan Aishwarya, 2012). Hal itu menunjukkan bahwa ternyata masih terjadi kesenjangan gender dan keberadaan wanita yang menduduki jabatan puncak masih sangat rendah.

Berdasarkan data Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2013, tercatat sebanyak 68.957 orang TKA yang bekerja di Indonesia. Jumlah direksi asing sebanyak 9.271 orang dan komisaris asing sebanyak 1.033 orang. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan karena pada tahun 2012, TKA yang menjabat sebagai direksi sejumlah 6.448 orang sedangkan yang menjabat sebagai komisaris hanya sejumlah 795 orang. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh kebutuhan dari perusahaan yang meningkat seiring dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Core *et al.* (1999) membuktikan bahwa dengan keberadaan komisaris yang berusia di atas 69 tahun di dalam dewan komisaris, maka terkait dengan *corporate governance* yang lemah dan naiknya kompensasi yang diberikan pada dewan

eksekutif perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun. Q, Liang *et al* (2013) menyatakan bahwa pertemuan dewan komisaris yang sering dilakukan dapat menjadi tanda bahwa dewan komisaris melakukan perannya dengan aktif.

Berbagai penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya hasil yang tidak konsisten dan berbeda-beda mengenai pengaruh variabel karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Q, Liang *et al* (2013) yang meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris pada kinerja bank di Cina, menemukan bahwa jumlah pertemuan dewan komisaris dan proporsi dari komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank. Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, komisaris asing, komisaris wanita, komisaris yang memiliki hubungan politik, komisaris yang merangkap jabatan sebagai CEO (*duality*), komisaris yang menjabat di lebih dari tiga perusahaan, dan komisaris yang berusia diatas 70 tahun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank.

Hingga saat ini pada umumnya penelitian tentang struktur *corporate governance* hanya dilakukan di negara-negara maju, namun sangat jarang dilakukan pada negara berkembang. Selain itu, penelitian tentang peran dewan komisaris pada perusahaan sektor perbankan juga sangat jarang dilakukan, oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dengan variabel ukuran dewan komisaris (*board size*), jumlah pertemuan dewan komisaris (*frequency of board meetings*), komisaris independen (*independent commissioner*), komisaris yang berkewarganegaraan asing (*foreign commissioner*), usia dewan komisaris (*age of commissioner*), dan komisaris wanita (*female commissioner*) terhadap kinerja bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Karakteristik Dewan Komisaris Dan Kinerja Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah karakteristik dewan komisaris (*board characteristics*) berpengaruh terhadap kinerja bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari karakteristik dewan komisaris (*board characteristics*) terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 – 2013.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak-pihak terkait khususnya peneliti, perusahaan, investor, dan akademisi.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi perusahaan perbankan di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan untuk dapat menilai kinerja dan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan khususnya dalam penerapan *corporate governance* di industri bank.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk menilai dan mengidentifikasi kondisi kinerja perusahaan yang akan dijadikan objek investasi sehingga dapat memilih perusahaan yang tepat.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan riset bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian ini dengan topik yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan teori keagenan, *corporate governance*, serta penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai dasar dan acuan dalam melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, dan model analisis untuk memberikan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pedoman pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan, yang terdiri dari pendekatan penelitian kuantitatif, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data sekunder, metode pengumpulan sampel, dan teknik analisis mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang berupa gambaran tentang obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja bank dengan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

### BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan atas hasil penelitian.